



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2021



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Dibacakan Oleh : MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.
No. Anggota : A-261

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu

M E R D E K A !!!

**Yang terhormat Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah
beserta jajarannya,
Rekan-rekan Anggota Dewan, rekan media dan hadirin sekalian yang kami
muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan anugerah serta bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama bertemu di ruang sidang ini untuk melaksanakan tugas legislasi kita sebagai anggota Dewan RI dalam Rapat Paripurna ini dengan agenda penyampaian pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022 (RUU APBN TA 2022) beserta dengan Nota Keuangannya sebagaimana yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI oleh saudara Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2021. Masih dalam suasana peringatan hari kemerdekaan RI kami segenap Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76.

Sampai dengan saat ini Pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan kita yang telah mengakibatkan perubahan kondisi yang luar biasa dan telah berdampak sangat signifikan dalam segala bidang kehidupan yaitu kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan kegiatan bersama keagamaan. Sampai dengan saat ini, pemulihan sosial dan ekonomi nasional sedang berlangsung, dan desain APBN tahun Anggaran 2022, akan sangat ditentukan oleh efektivitas pemulihan sosial dan ekonomi yang sedang dijalankan di Tahun 2021 ini. Oleh karena itu, Pemerintah dalam menjalankan program pemulihan sosial dan ekonomi di tahun 2020 ini, agar dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam memulihkan derajat kesejahteraan rakyat dalam hal kesehatan,

memenuhan kebutuhan pokok, pekerjaan, memulihkan lapangan usaha rakyat, serta pemulihan program-program strategis nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan industri nasional.

Upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan dimasa yang sulit seperti sekarang ini sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras selama ini, karena dengan merebaknya wabah Covid 19 ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian secara global. Wabah Covid 19 ini telah menimbulkan tekanan pada perekonomian seluruh negara termasuk Indonesia. Isu utama yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah penanganan kesehatan masyarakat sehingga dukungan dalam penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin, obat dan pencegahan wabah di masa depan serta program-program pemulihan ekonomi nasional menjadi sangat penting pada saat kondisi sekarang ini. Pertumbuhan perekonomian yang diupayakan pemerintah menunjukkan hasil yang positif dimana kuartal kedua tahun 2021 ini tumbuh pesat diangka 7,07% dikarenakan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan sosial, diskon listrik serta subsidi pajak dapat mendorong meningkatkan daya beli masyarakat dan terkendalinya tingkat inflasi. Sudah menjadi hal yang lazim dimana suatu negara berkembang dihadapkan pada masalah-masalah kemiskinan, pengangguran dan Pendidikan. Pemerintah menunjukkan kesaktiannya dengan menurunkan angka kemiskinan dari 10,12% pada September 2017, 9,82% pada Maret 2018 dan berada di angka 9,22% di September 2019 ini merupakan sebuah pencapaian yang baik dalam beberapa tahun kebelakang. Kami berharap Pemerintah terus dapat melanjutkan prestasi yang cukup membanggakan ini.

Bappenas,
BKF (PKEM),
DJA,
SD1

Dari apa yang disampaikan pemerintah menjadikan kami dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat mengambil kesimpulan jika kinerja pemerintah harus terus ditingkatkan dari waktu-kewaktu dan berkesinambungan. Dengan tata kelola yang baik akan menunjukkan bagaimana hasil tidak akan mengkhianati upaya dan usaha namun introspeksi hendaknya dijadikan acuan untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang tidak menutup kemungkinan akan mengarahkan kepada manuver yang dapat membawa sebuah tujuan yang di inginkan. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota sidang serta hadirin sekalian rancangan pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global tentulah ini sejalan dengan prinsip Bung Karno untuk membangun suatu negara tidak hanya membangun fisik yang sifatnya material namun sesungguhnya jiwa bangsa sehingga rasa gotong-royong dan kebersamaan akan muncul sebagai satu ikatan untuk membangun negara ini sehingga sejajar dengan negara maju di dunia. Naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami kenaikan dari 2016 sebesar 70,18 poin dan di tahun 2020 sebesar 71,94 poin yang terjadi secara merata diseluruh daerah serta indeks daya saing naik dari peringkat 53 dunia pada 2014 menjadi peringkat 40 pada 2020, kiranya dapat dijadikan dasar keyakinan pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul secara merata. Upaya pemerintah menjadi sesuatu yang berbiaya tinggi bila tidak dijalankan dengan perhitungan dan strategi yang tepat kami mengkhawatirkan ini akan menjadikan sebuah celah untuk menjadikan defisit anggaran yang hasilnya tidak tampak secara fisik.

Bappenas,
Kemenko Ekon
BKF
(PKAPBN,PKEM)
DJA,
SD1,
SD3

Kami berharap kepada pemerintah dapat memenuhi defisit anggaran pada tahun 2022 dengan rencana Pendapatan Negara Rp.1.840,7 triliun dan Belanja Negara Rp.2.708,7 triliun, maka Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp.868 triliun. Pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.541,7 triliun atau 20% dari APBN yang akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM hendaknya senantiasa tetap dijaga dan diawasi dalam

BKF (PKAPBN)
DJA (Dit. Abid
PMK)
SD1,
SD3

pelaksanaannya dengan baik karena itu sejalan dengan amanat konstitusi yang wajib ditaati dan merupakan prestasi bangsa dan negara dimasa depan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan hendaknya tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan selalu memberikan pemahaman tentang sejarah dan perjuangan bangsa sehingga memiliki jati diri bangsa yang dapat menyaring budaya-budaya dari luar yang dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang, serta hadirin yang dimuliakan

Kebijakan dalam RAPBN ini disusun dalam perekonomian global dan nasional yang masih berada pada situasi pandemi Covid-19. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Pemerintah memproyeksikan kinerja perekonomian pada tahun 2022 tumbuh relatif tinggi, yaitu pada kisaran 5,0% - 5,5%. Dengan skema ini, Pemerintah agar memberikan perhatian pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Konsumsi masyarakat masih menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional, untuk itu Pemerintah lebih memperkuat sektor-sektor usaha yang sudah mulai kembali pulih.
- Dengan target pertumbuhan ini otomatis dari sisi penerimaan negara harus dioptimalkan, dan sampai dengan saat ini penerimaan terbesar masih diandalkan dari sektor perpajakan untuk itu langkah kebijakan yang diambil untuk perpajakan harus cermat agar tidak berlawanan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.
- Pengeluaran negara harus lebih diefisienkan, selain untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi pembangunan nasional juga harus menjadi prioritas ini dapat menjadi nilai tambah bagi sektor usaha seperti perdagangan, pertanian, perikanan sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian nasional.
- Harga minyak yang masih rendah pada 2022, kebijakan pemerintah di sektor ini lebih diarahkan pada optimalisasi produksi minyak, kebijakan di sektor hulu minyak dan gas serta percepatan penyelesaian kilang minyak untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah juga menetapkan dalam RAPBN Tahun 2022 NTP dan NTN berada pada kisaran 102-104 dan 102-105. Dengan melihat perkembangan data NTP dan NTN dari tahun 2010 sampai dengan 2020 kita pernah mencatat NTP tertinggi yaitu 115 di tahun 2012 dan NTN tertinggi yaitu 114 di tahun 2014. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat Pemerintah masih dapat meningkatkan angka NTP dan NTN untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para petani dan nelayan sebagai bagian dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia. Kami berharap pada tahun anggaran ini dan seterusnya pemerintah dapat mendorong semua elemen bangsa agar timbul kebanggaan terhadap bangsa dan negaranya, sudah saatnya kita harus berubah bukan lagi negara pemakai melainkan harus menjadi negara penghasil untuk

Bappenas,
BKF (PKEM)
DJA,
SD1

Bappenas,
BKF (PKEM)
DJA,
SD1

itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membentuk dan memfasilitasi semua penelitian guna kemajuan bangsa karena tanpa dengan campur tangan pemerintah hal tersebut mustahil untuk dicapai. Sebagai bangsa yang berkeinginan untuk maju kita harus dapat terus berpacu dengan kemajuan jaman dengan tidak mungkin kita menjadi yang terdepan. **Pemerataan dan kesetaraan pembentukan manusia Indonesia yang unggul juga menjadi beban yang hendaknya pemerintah mampu memberikan solusi jangan lagi ada masalah kesenjangan yang memperlambat dalam mencapai cita-cita bangsa ini merupakan hal yang juga berlawanan dengan tujuan pembangunan yang hendak dicapai.**

Bappenas,
BKF (PKEM)
DJA,
SD1

Pembangunan merupakan tanggung jawab Bersama bukan tanggung jawab eksekutif saja. Panduan ini hendaknya menjadi hal pokok yang memuat prinsip-prinsip segala sesuatu tentang pelaksanaan aspek politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan sehingga Presiden dan kepala daerah memiliki visi dan misi yang sejalan. Pemerintah hendaknya menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran untuk mengantisipasi segala kemungkinan di masa yang akan datang sehingga segala sesuatunya terukur dan terarah.

BKF (PKAPBN)
DJA,
SD1,
SD2,
SD3

Tantangan pengelolaan APBN semakin berat pada tahun-tahun kedepan, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2020 Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa konsolidasi fiskal agar tetap dapat menciptakan ruang fiskal yang memadai dalam melanjutkan penguatan program pemulihan sosial-ekonomi, penyelesaian program strategis nasional prioritas dan percepatan reformasi struktural. Untuk itu RAPBN Tahun 2022 menjadi landasan yang sangat penting dalam menjalankan konsolidasi fiskal Tahun 2023. Agenda penting Pemerintah pada tahun 2022 adalah mempercepat reformasi belanja Pemerintah, mencari atau menciptakan sumber-sumber pendapatan baru. Dan Pemerintah dapat mengoptimalkan momentum tersebut untuk melakukan berbagai reformasi kebijakan dalam mempercepat terwujudnya Indonesia Maju.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan hadirin sekalian kami berharap segala bentuk kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah senantiasa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan didedikasikan untuk pembangunan bangsa. Kami mendukung penuh terhadap kebijakan yang hendak dijalankan pemerintah namun kami perlu mengingatkan jika apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kepribadian bangsa bukan hanya berfokus pada hasil semata namun bertentangan dengan Pancasila. **Dengan peningkatan angka transfer dan dana ke daerah ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat berjalan dengan baik dan percepatan pembangunan dengan basis pemerataan ini masih perlu diadakan beberapa kajian serius untuk penguatan dan perundang-undangan menjadi arah dan pedoman untuk mencapai kualitas yang diharapkan dan memperkecil penyimpangan.**

DJPK,
DJA,
SD4

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan pandangan dan pemikiran serta saran diatas kami Fraksi PDI-Perjuangan pada prinsipnya memahami dan menyatakan menyetujui melanjutkan untuk membahas lebih lanjut dengan Pemerintah secara cermat, teliti, seksama, dan mendalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2022 dan agar catatan-catatan yang telah kami sampaikan dapat menyempurnakan RAPBN 2022, sehingga APBN Tahun Anggaran 2022 dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Demikianlah pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 atas segala perhatian Sidang Dewan yang terhormat kami mengucapkan terimakasih.

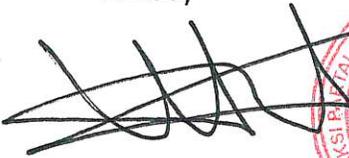
Wassalamu'aliakum warahmatullahi Wabarakatuh

Om shanti shanti shanti om

MERDEKA !!!

Jakarta, 19 Agustus 2021

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua, Sekretaris,


UTUT ADIANTO
Nomor Anggota A-194




BAMBANG WURYANTO
Nomor Anggota A-184